COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMEDANG

Fajar Budiman
NPP. 33.0382
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: fajarbudiman30012003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tri Raharjanto, S.STP, M.Si, M.H.
Email: tri.rahardjanto73@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The author focuses on the problem of the high urgency of extreme poverty eradication that demands multi-sectoral synergy, whereas structurally, the collaborative process remains vulnerable due to overlapping authorities between regional government agencies and unsynchronized operational regulations in the implementation of the Sekolah Rakyat Terintegrasi Program in Sumedang Regency.* ***Purpose:*** *This study aims to identify, analyze, and describe the Collaborative Governance in the implementation of the Sekolah Rakyat Terintegrasi Program in Sumedang Regency.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach. The techniques of collecting data are done by interviews, observations, and documentation studies.* ***Result:*** *This study found that Collaborative Governance in the Sekolah Rakyat Terintegrasi Program varies its different dimensions. In the starting conditions dimension, collaboration is strongly driven by the urgency of poverty reduction and resource interdependence among regional government agencies. In the facilitative leadership dimension, the roles of the Regent and the Regional Secretary serve as the primary key to mobilizing cross-sectoral actors. Meanwhile, in the collaborative process dimension, synergy is successfully built through intensive face-to-face dialogue. However, in the institutional design dimension, structural vulnerabilities are found, marked by overlapping authorities where the Social Affairs Office took over technical functions belonging to the education sector, which is further exacerbated by suboptimal operational guidelines, negative public perception of the boarding system, and the potential for sectoral ego.* ***Conclusion:*** *This study concludes that Collaborative Governance in the implementation of the Sekolah Rakyat Terintegrasi Program in Sumedang Regency has generally operated effectively in building synergy and commitment among actors to break the cycle of extreme poverty, despite remaining structurally vulnerable. It is recommended that policy and authority synchronization be conducted to resolve overlapping mandates, and operational regulations be strengthened to ensure program sustainability.*
Keywords: *Collaborative Governance, Poverty Alleviation, Sekolah Rakyat Terintegrasi.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya urgensi penanganan kemiskinan ekstrem yang memerlukan penanganan lintas sektor, namun secara struktural proses kolaborasinya masih rentan akibat adanya tumpang tindih kewenangan antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta regulasi operasional yang belum sinkron dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam program ini memiliki dinamika yang bervariasi pada setiap dimensinya. Pada dimensi kondisi awal, kolaborasi didorong secara kuat oleh urgensi penanganan kemiskinan dan ketergantungan sumber daya antar-OPD. Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif, peran Bupati dan Sekretaris Daerah berhasil menjadi kunci utama dalam menggerakkan aktor lintas sektor. Sementara itu, pada dimensi proses kolaborasi, sinergi telah terbangun dengan baik melalui dialog tatap muka yang intensif. Namun, pada dimensi desain institusional, ditemukan hambatan berupa tumpang tindih kewenangan di mana Dinas Sosial mengambil alih fungsi teknis urusan bidang pendidikan, yang diperparah oleh belum optimalnya petunjuk teknis operasional, persepsi masyarakat terhadap sistem berasrama, serta adanya potensi ego sektoral. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan dengan baik dalam membangun sinergi dan komitmen antar-aktor untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, meskipun secara struktural masih rentan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya melakukan sinkronisasi kebijakan dan kewenangan yang tumpang tindih, serta penguatan regulasi operasional untuk menjamin keberlanjutan program

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pengentasan Kemiskinan, Sekolah Rakyat Terintegrasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan berkualitas dan inklusif merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan serta instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan (UNESCO, 2023). Sebagai kontribusi nyata dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan miskin ekstrem, pemerintah meluncurkan kebijakan afirmatif berupa Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Lebih jauh lagi, strategi fundamental yang krusial dalam mengentaskan kemiskinan jangka panjang adalah upaya pembangunan sumber daya manusia melalui subsidi pendidikan yang merata dan tepat sasaran, sehingga masyarakat rentan memiliki kesempatan untuk memutus lingkaran setan kemiskinan (Fadillah, 2021). Upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi sering kali menghadapi tantangan sosiokultural berupa rendahnya kesadaran transformatif dari masyarakat rentan, yang pada akhirnya memicu resistensi terhadap program pemberdayaan dan mempersulit pemutusan mata rantai kemiskinan generasi mendatang (Kumbara et al., 2023). Tantangan ini kian diperberat oleh fakta bahwa sebagian besar program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan projek dan bukan pendekatan program, sehingga intervensi yang diberikan cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (2024), Kabupaten Sumedang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 108,9 ribu jiwa atau sekitar 9,17% dari total penduduk. Meskipun Sumedang mencatatkan angka putus sekolah yang relatif rendah di Jawa Barat, keberadaan 76 siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP negeri tetap menjadi tantangan riil yang mengindikasikan adanya celah akses pendidikan bagi kelompok rentan di tingkat dasar (Dinas Pendidikan Jabar, 2024). Untuk menjawab tantangan multidimensional seperti tingginya angka putus sekolah pada kelompok rentan, diperlukan pendekatan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga bersifat holistik, ramah anak, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak di lingkungan sekolah (Vebrianto et al., 2025).

Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota pertama di Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat. Ketetapan ini menjadi momentum strategis bagi daerah, mengingat perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah akan lebih berhasil jika ia dilakukan dengan memprioritaskan potensi dan sektor yang menjadi unggulan daerah (Rahardjanto, 2018). Model yang ditawarkan di Sumedang adalah integrasi lintas jenjang berbasis asrama (boarding school) yang menyatukan layanan pendidikan SD, SMP, hingga SMA dalam satu ekosistem pembelajaran berkelanjutan, di mana Dinas Sosial bertindak sebagai instansi penanggung jawab (leading sector). Keberhasilan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan ini juga sangat bergantung pada kompetensi pedagogik tenaga pendidik; di mana integrasi antara kreativitas dan strategi pedagogi menjadi fondasi utama untuk merancang pengalaman belajar yang responsif, bermakna, dan mampu mengoptimalkan potensi siswa.(Alfan et al., 2026)

Dalam praktiknya, model integrasi lintas jenjang ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut membagi kewenangan pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP) kepada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah (SMA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ketidaksesuaian desain program dengan pembagian kewenangan formal ini, ditambah pengalihan fungsi teknis pendidikan ke Dinas Sosial, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, ketidakjelasan koordinasi, ego sektoral, serta kendala manajemen penganggaran. Dalam situasi transisi regulasi seperti ini, budaya organisasi yang baik dapat juga mempengaruhi beberapa proses pengambilan keputusan yang krusial untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas dan pelaksanaan proses program di tingkat local (Lambelanova et al., 2024) .Ketidakoptimalan capaian sebuah program nasional di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh hambatan internal tata kelola, seperti adanya arahan pelaksanaan yang kurang jelas serta minimnya inovasi program yang diusung oleh instansi pelaksana di level bawah.(Theresa, 2024). Oleh karena itu, mengingat kompleksitas pengalihan urusan ini ke Dinas Sosial, aspek pengawasan dan evaluasi merupakan dua aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan suatu program agar potensi kegagalan koordinasi dapat dimitigasi sejak awal(Nasution & Mulyana, 2022).

Mengingat kompleksitas hubungan lintas level pemerintahan dan keterlibatan aktor non-pemerintah, pendekatan *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen publik. Pola tata kelola kolaboratif ini sangat diperlukan sebagai ruang deliberatif yang inklusif untuk menyelaraskan perbedaan kewenangan formal, meminimalisasi tumpang tindih kebijakan, serta membangun sinergi yang kokoh antar-institusi. Melalui proses komunikasi yang setara tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya mereka demi tercapainya tujuan program yang optimal (Handayani & Tumija, 2016). Oleh karena itu, penelitian berjudul **"*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang"** penting dilakukan

guna mengkaji efektivitas kolaborasi yang berjalan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya secara komprehensif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan rumitnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antar-instansi dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang, sementara itu program ini telah ditetapkan sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) baru oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor pelayanan dasar pendidikan secara inklusif.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dalam mengawal program sekolah berasrama terintegrasi di Kabupaten Sumedang ini. Faktor kemiskinan dan pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satunya. Cukup banyak anak usia sekolah di Kabupaten Sumedang yang rentan putus sekolah karena keterbatasan finansial keluarga, yang kemudian memaksa mereka memasuki usia kerja lebih awal. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang (2024) bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah ini masih berada pada angka yang signifikan, yaitu mencapai 108,9 ribu jiwa atau sekitar 9,17 persen dari total populasi. Tingginya beban ekonomi keluarga miskin ini linear dengan fenomena banyaknya anak dari kelompok rentan yang kesulitan menuntaskan wajib belajar dua belas tahun, di mana mereka cenderung terserap ke sektor informal demi membantu pendapatan orang tua ketimbang melanjutkan sekolah ke jenjang menengah. Padahal, dalam menyukseskan program strategis berskala nasional, dibutuhkan kesiapan daerah dalam memetakan data anak rentan serta komitmen instansi terkait untuk menjamin kelangsungan pendidikan mereka (meskipun di tengah keterbatasan sarana).

Kurangnya kesiapan desain institusional dan harmonisasi regulasi di tingkat lokal menjadi permasalahan berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ego sektoral kerap muncul ketika sebuah program baru bersifat lintas urusan, di mana instansi teknis cenderung berjalan sendiri-sendiri berdasarkan dasar hukum masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, sedangkan pendidikan menengah (SMA) berada di bawah pemerintah provinsi. Kontradiksi struktural terjadi karena Program Sekolah Rakyat ini mengintegrasikan seluruh jenjang dari SD hingga SMA, namun secara operasional di lapangan justru diletakkan di bawah kendali teknis Dinas Sosial selaku leading sector pengentasan kemiskinan. Ketidaksesuaian regulasi ini memicu kebingungan pembagian urusan formal dan kerancuan koordinasi, karena masing-masing dinas (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) memiliki struktur anggaran, birokrasi, dan indikator kinerja yang berbeda.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian wewenang pada awal peluncuran program strategis ini berpotensi memunculkan sikap saling lempar tanggung jawab (meskipun tidak seluruhnya). Terlihat dari proses sinkronisasi data anak putus sekolah dan pembagian urusan manajemen tenaga pendidik antar-instansi yang berjalan lambat akibat belum adanya pola komunikasi yang baku. Komplikasi bertambah karena para aktor birokrasi di daerah dituntut untuk bergerak cepat memenuhi target capaian nasional, sementara landasan regulasi lokal untuk berkolaborasi dan melakukan urunan anggaran (cost-sharing) antar-level pemerintahan belum sepenuhnya matang dan berisiko memicu temuan administratif.

Meskipun berbagai studi telah membahas mengenai tumpang tindih kewenangan birokrasi, hambatan implementasi kebijakan pendidikan, dan ego sektoral dalam pelayanan publik di Indonesia, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kompleksitas regulasi asimetris tersebut terhadap proses *Collaborative Governance* pada Program Strategis Nasional yang benar-benar baru diluncurkan. Khususnya dalam memahami bagaimana dinamika keterlibatan multi-

aktor antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait dibangun dari titik nol dalam mengelola Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah setempat selanjutnya dalam peningkatan koordinasi lintas sektor dan harmonisasi regulasi di tengah berbagai tantangan birokrasi seperti tumpang tindih kewenangan, rigiditas sekat anggaran, dan ego sektoral antar-instansi teknis.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta dinamika hambatan kolaborasi antar-aktor secara faktual, sehingga perumusan strategi pengembangan dan sinkronisasi kebijakan tata kelola program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat Terintegrasi sebagai Program Strategis Nasional baru dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan karena tidak didukung oleh data serta analisis yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam sektor pendidikan, penanggulangan kemiskinan, pembuatan kebijakan, maupun inovasi pelayanan publik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *collaborative governance* memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Herawan et al. (2023) mengkaji kolaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan indeks mutu pendidikan di Jawa Barat melalui program sekolah gratis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tiga dimensi kemitraan (vertikal, horizontal, dan hubungan kemitraan) menurut Weber et al. (2005) yang berfokus pada peningkatan Indeks Lama Sekolah (ILS) sebagai objek penelitian. Jaya et al. (2023) meneliti efektivitas tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan *collaborative governance framework* menurut Ansell dan Gash (2008), dengan objek kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Penelitian Afrisal et al. (2022) membahas peran negosiasi peraturan dalam pembuatan kebijakan yang kompleks menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model kolaborasi Ansell dan Gash (2008), yang berfokus pada kepuasan dan proses pembelajaran pemangku kepentingan selaku objek penelitian. Selanjutnya, Asriani et al. (2024) juga mengkaji efektivitas kolaborasi dalam inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Makassar menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Ansell dan Gash (2008), dengan objek implementasi program berbasis aplikasi "Kucataki" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Wijayanti & Kasim (2021) meneliti tata kelola kolaboratif dalam implementasi strategi nasional pencegahan korupsi menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dengan pendekatan *collaborative governance regimes* menurut Emerson dan Nabatchi (2015), dengan objek hambatan struktural dan penyesuaian payung hukum pada Sekretariat Nasional. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan yakni tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) pada Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang yang menyandang status sebagai Program Strategis Nasional (PSN) baru, yang seharusnya memiliki tingkat koordinasi dan komitmen pemangku kepentingan yang lebih dinamis serta responsif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang berfokus penuh pada pemetaan aktor dari titik nol, yang juga berbeda secara kontekstual dengan penelitian Herawan et al. (2023), Jaya et al. (2023), Afrisal et al. (2022), Asriani et al. (2024), maupun Wijayanti & Kasim (2021) yang mayoritas mengevaluasi program-program yang sudah berjalan lama atau berskala reguler. Selain itu, pengukuran/indikator/teori yang digunakan peneliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan model analisis dari Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* ditentukan oleh variabel kondisi awal (starting conditions), desain institusional (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan proses kolaborasi (collaborative process) yang berjalan secara bertahap dan berulang.

1.6. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan *Collaborative Governance* dalam Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang.

II. METODE.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah guna memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena tata kelola kolaboratif yang terjadi di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak sekadar menilai fakta secara angka, tetapi untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, metode ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas respon masyarakat serta sinergi lintas sektor secara holistik dan komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang menggabungkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam objek penelitian. Terdapat 12 informan yang dilibatkan, yang terdiri dari unsur pembuat kebijakan (Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, serta pejabat Baperida), unsur pengawasan legislatif (Anggota DPRD Komisi IV), unsur pelaksana lapangan dan mitra (Kepala Desa, Pendamping PKH, dan PT Brantas Abipraya), pihak media (Radar Sumedang), serta dua orang tua siswa sebagai penerima manfaat langsung program. Kombinasi informan yang mewakili pemerintah, swasta, dan masyarakat ini dipilih agar peneliti memperoleh informasi dari beragam perspektif secara utuh.

Dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan dan kedalaman informasi dijaga melalui peran peneliti sebagai instrumen utama (human instrument). Peneliti bertugas menetapkan fokus,

mengumpulkan data langsung di lapangan, serta merespons berbagai dinamika interaksi sosial yang terjadi. Data primer dari wawancara dan observasi kemudian disilangkan dan divalidasi dengan data sekunder berupa dokumen arsip, regulasi (seperti Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati), serta laporan perencanaan pembangunan terkait Sekolah Rakyat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) dalam (Sugiyono, 2022) , yang pelaksanaannya berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Tahapan analisis ini mencakup reduksi data (memilih dan menyederhanakan data lapangan yang relevan), penyajian data (data display) untuk melihat hubungan antar-tema yang terorganisir, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis ini difokuskan untuk membedah dimensi kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi berdasarkan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus utama lokus penelitian berada di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial sekaligus penanggung jawab program. Pengumpulan data dan penyusunan penelitian ini dilakukan secara bertahap selama kurang lebih sebelas bulan. Rentang waktu tersebut direncanakan agar peneliti mampu mengamati fenomena kolaborasi antaraktor secara aktual dan mendalam sesuai dengan tahapan implementasi program yang sedang berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program nasional sekolah rakyat terintegrasi di kabupaten sumedang menggunakan pendapat dari Ansell and Gash (2008) yang menyatakan bahwa *Collaborative Governance* memiliki empat dimensi. yaitu kondisi awal, Kepemimpinan fasilitatif, Desain Institusional dan Proses Kolaborasi Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Analisis kondisi awal (starting conditions) dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang mengacu pada kerangka teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008). Dimensi ini mengkaji fondasi utama yang membentuk konteks awal kolaborasi melalui empat aspek utama:

1. Ketimpangan Sumber Daya dan Ketergantungan Antaraktor

Kondisi awal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang ditandai oleh adanya asimetri atau ketimpangan sumber daya yang cukup signifikan antaraktor, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, memiliki keunggulan mutlak dalam hal kapabilitas finansial, otoritas program, serta dukungan kebijakan berskala nasional. Sebagaimana dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Bapak Budi Rahman, S.Sos., M.Si., seluruh dana pembangunan fisik dan alokasi anggaran utama ditanggung langsung oleh kementerian pusat, sehingga posisi pemerintah daerah dalam program ini murni bertindak sebagai fasilitator yang bertugas memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan eksekusi lapangan berjalan lancar. Walakin, keterbatasan finansial daerah ini berhasil diimbangi oleh keunggulan lokal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu penguasaan wilayah yang

mendalam, kedekatan sosiologis dengan konstituen, serta kapasitas mobilisasi sosial yang tinggi untuk kebutuhan penyediaan lahan dan seleksi peserta didik. Insentif Bersama

Ketimpangan sumber daya ini pada akhirnya tidak melahirkan pola hubungan yang kompetitif atau subordinatif, melainkan bertransformasi menjadi hubungan saling ketergantungan (interdependence) yang fungsional. Pemerintah pusat secara struktural tidak dapat mengeksekusi program tanpa adanya kesiapan dan legalitas lahan dari daerah, sementara pemerintah daerah membutuhkan intervensi anggaran pusat untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan berskala masif tersebut. Guna memenuhi prasyarat dari pusat, Pemkab Sumedang menunjukkan komitmen konkret dengan menggelontorkan dana APBD yang sangat besar, yakni hampir 9 miliar rupiah khusus untuk proses pembebasan lahan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ibu Dra. Marlina, M.Si., menambahkan bahwa instansinya terlibat aktif sejak awal untuk mengidentifikasi lokasi, meninjau kondisi fisik tanah, hingga memastikan kematangan lahan memenuhi standar teknis pembangunan. Hubungan timbal balik ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah, Ibu Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., yang menyatakan bahwa pembagian kerja dalam kolaborasi ini sangat eksplisit: pusat bertanggung jawab atas pendanaan dan konstruksi fisik, sedangkan daerah bertanggung jawab atas penyediaan ruang baku, seleksi siswa, dan orkestrasi operasional di lapangan. Dengan demikian, ketimpangan sumber daya di awal justru menjadi faktor pendorong (driving factor) utama kolaborasi karena setiap aktor memiliki peran strategis unik yang tidak dapat dieliminasi oleh aktor lainnya.

2. Insentif bersama

Motivasi para aktor untuk terlibat aktif dalam kolaborasi ini digerakkan oleh adanya insentif bersama yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi sosial, ekonomi, hingga kelembagaan dan politik. Dari perspektif sosial, program ini menawarkan insentif berupa solusi sistemik untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan yang polanya dirancang secara terintegrasi dan tidak parsial. Menurut penjelasan Sekda Kabupaten Sumedang, intervensi tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik di asrama, melainkan turut menyasar ekosistem keluarganya; jika orang tua siswa berada pada usia produktif, mereka akan diberikan stimulus berupa pelatihan kerja dan bantuan usaha, serta usulan perbaikan jika kondisi hunian mereka masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pendekatan holistik inilah yang memperkuat daya tarik program bagi instansi lintas sektor karena dampak keberhasilannya diproyeksikan bersifat jangka panjang.

Dari aspek ekonomi dan pembangunan daerah, terdapat insentif pragmatis-strategis yang sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sekda mengungkapkan sebuah kalkulasi investasi yang fantastis, di mana dengan modal pembebasan lahan senilai 9 miliar rupiah dari dana daerah, Kabupaten Sumedang berhasil menarik stimulan anggaran stimulus dari kementerian pusat senilai 600 miliar rupiah. Selain itu, pembangunan kompleks sekolah ini diproyeksikan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Kecamatan Ujung Jaya, melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan geliat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar sejak masa konstruksi. Dari sisi perencanaan daerah, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida, Ibu Nela Megalita, S.E., menekankan bahwa program ini selaras dengan target makro daerah untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan Angka

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Insentif ini semakin solid berkat adanya dukungan politberupa legitimasi kebijakan dari DPRD Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Bapak Endang Supriatna, serta motivasi dari para pekerja dan pelaksana pembangunan di lapangan, sehingga memperkuat komitmen kolektif dari level kebijakan hingga tatap muka masyarakat.

3. Riwayat Kerjasama Sebelumnya

Fondasi kondisi awal kolaborasi di Sumedang juga sangat dipengaruhi oleh riwayat hubungan antaraktor di masa lalu, yang dalam konteks ini bertindak sebagai modal sosial (social capital) yang berharga. Kabupaten Sumedang diuntungkan oleh adanya jalinan kerja sama lintas sektor yang telah terbentuk lama melalui implementasi program-program jaminan sosial terdahulu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua Tim PKH, Bapak Agus Taufik Habibie, mengungkapkan bahwa kedekatan koordinasi horizontal dengan Dinas Sosial sudah terbangun secara natural bahkan sebelum Program Sekolah Rakyat ini dilegalkan secara formal. Pola komunikasi yang cair ini juga diakui oleh Kepala Desa Kebon Cau, Bapak Dodo Kuswanda, yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah desa sudah sangat terbiasa bekerja sama dan berkomunikasi dengan Dinas Sosial dalam mengawal program jaring pengaman sosial, sehingga proses adaptasi birokrasi terhadap program baru ini tidak perlu dimulai dari nol melainkan tinggal mengaktivasi jaringan yang sudah ada.

Kendati didominasi oleh rekam jejak interaksi yang positif, riwayat hubungan birokrasi di Sumedang bukan berarti sepenuhnya berjalan tanpa hambatan dan friksi. Sekda Kabupaten Sumedang mengakui bahwa tantangan kultural berupa ego sektoral tetap sewaktu-waktu muncul ke permukaan, di mana setiap instansi atau OPD terkadang memiliki cara pandang, indikator kinerja, dan kepentingan internalnya masing-masing. Namun, tantangan ego kelembagaan tersebut sejauh ini dapat diredam melalui eskalasi frekuensi rapat koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi formal secara terus-menerus guna menyamakan frekuensi berpikir. Selain ego sektoral, tantangan koordinasi juga dipicu oleh perbedaan garis komando struktural dan kewenangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E., yang menekankan pentingnya komunikasi intensif agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Secara garis besar, porsi riwayat kerja sama yang baik di Sumedang jauh lebih dominan ketimbang konflik masa lalu, sehingga menjadi modal awal yang kokoh bagi pelembagaan *Collaborative Governance*.

4. Tingkat Urgensi Permasalahan

Tingkat urgensi masalah merupakan katalisator krusial yang menuntut dan memaksa para aktor untuk menepikan sekat-sekat sektoral demi melahirkan sebuah tindakan kolaboratif yang cepat. Di Kabupaten Sumedang, urgensi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat ini bersumber langsung dari realitas objektif di lapangan mengenai masih tingginya angka kemiskinan serta keterbatasan akses pendidikan formal yang berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan. Baperida melalui Ibu Nela Megalita, S.E., menegaskan bahwa urgensi program ini terletak pada visinya untuk memberikan keadilan sosial dan kesempatan akademik yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Urgensi senada juga dirasakan secara nyata oleh para aktor lapangan seperti pendamping PKH yang melihat langsung bagaimana program ini mampu memberikan dampak ganda yang masif, baik bagi pemenuhan hak pendidikan anak maupun bagi stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat.

Urgensi program bersumber dari kondisi objektif tingginya kebutuhan perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan ekonomi. Pada fase awal, sempat muncul celah informasi (information gap) dan resistensi psikologis dari orang tua siswa terkait konsep pendidikan berasrama (boarding school). Namun melalui sosialisasi persuasif, pendekatan langsung dari pendamping sosial, serta pertimbangan keterbatasan ekonomi, kekhawatiran tersebut bertransformasi menjadi optimisme, sehingga memberikan legitimasi sosial yang utuh dari masyarakat penerima manfaat.

Dimensi urgensi ini tidak hanya dipandang secara top-down dari kacamata pembuat kebijakan, melainkan juga mengalami dinamika penerimaan dan legitimasi sosiologis dari sudut pandang wali murid di tingkat akar rumput. Pada fase inisiasi awal, sempat muncul resistensi psikologis, kebingungan, dan kecemasan yang mendalam dari para orang tua siswa—seperti yang dialami oleh Ibu Enung Nurlaela dan Ibu Nurlia—mengenai format pendidikan berasrama (boarding school) yang mewajibkan anak-anak mereka tinggal jauh dari proteksi orang tua. Namun, setelah dilakukan sosialisasi yang persuasif oleh pemerintah desa dan pendamping sosial, serta didorong oleh realitas tekanan ekonomi keluarga yang pas-pasan, kekhawatiran tersebut berubah menjadi optimisme dan rasa syukur. Kesadaran para orang tua bahwa seluruh biaya hidup dan fasilitas pendidikan anak ditanggung penuh oleh negara, digabungkan dengan harapan besar akan perbaikan nasib keluarga di masa depan, melahirkan pengakuan kolektif akan pentingnya program ini. Walhasil, kondisi awal kolaborasi di Sumedang dapat dikategorikan berada pada posisi yang stabil; fondasi struktural, insentif finansial-politis yang masif, serta modal sosial masa lalu terbukti mampu mengakselerasi fase awal koordinasi, meskipun pemda tetap harus waspada terhadap residu ego sektoral internal dan potensi celah informasi (information gap) di tingkat masyarakat tapak.

3.2. Kepemimpinan

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, dimensi kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) dari pimpinan daerah menjadi faktor kunci penentu keberhasilan, keberlangsungan, dan penggerak seluruh pemangku kepentingan dalam Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang. Komitmen yang kuat dari Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi modal utama dalam membangun keyakinan bersama lintas aktor, sehingga kolaborasi tetap berjalan responsif untuk memenuhi persyaratan program dari pemerintah pusat meskipun pada tahap awal daerah belum sepenuhnya siap. Komitmen ini juga diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang adaptif dan solutif demi mengatasi kendala teknis di lapangan, salah satunya dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.9/Kep.481-DINSOS/2025 yang mengizinkan penggunaan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi pembelajaran sementara sebelum gedung permanen selesai dibangun.

Peran kepemimpinan fasilitatif harian dijalankan secara aktif oleh Sekda Kabupaten Sumedang, Ibu Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., yang bertindak sebagai koordinator utama. Sekda secara intensif menghubungkan berbagai aktor baik secara horizontal maupun vertikal, mulai dari tingkat desa, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD), pemerintah provinsi, hingga kementerian pusat. Dalam menjalankan peran ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang lebih memosisikan diri sebagai fasilitator yang menjamin kelancaran program seperti penyediaan lahan dan koordinasi lapangan bukan sebagai pelaksana utama

pembangunan fisik. Hal tersebut dikarenakan seluruh anggaran dan dana pembangunan sekolah ditanggung langsung oleh Kementerian Sosial di tingkat pusat. Melalui pendekatan ini, kepemimpinan daerah di Sumedang berhasil menekankan fungsi koordinatif dan fleksibilitas kebijakan guna menyatukan berbagai aktor agar dapat bekerja secara sinergis.

3.3. Desain Institusional

Dimensi desain institusional dalam *Collaborative Governance* Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang merujuk pada aturan main, struktur, serta mekanisme formal yang mengatur jalannya kolaborasi agar berjalan terarah dan akuntabel. Secara umum, dimensi ini dinilai sudah cukup baik karena didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, di mana program ini telah terintegrasi sebagai program strategis nasional yang selaras dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten). Legitimasi normatif ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemda, meskipun pada tahap awal pelaksanaan masih menghadapi kendala teknis operasional akibat belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang rinci mengenai asesmen, serta adanya keraguan dari orang tua siswa terkait konsep sekolah berasrama.

Dari aspek transparansi proses, Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai cukup terbuka dalam memberikan informasi mengenai tujuan dan perkembangan program kepada pemangku kepentingan maupun publik melalui media massa (seperti Radar Sumedang). Komunikasi antaraktor juga diperkuat lewat mekanisme evaluasi berkala, rapat koordinasi, serta monitoring lapangan yang dipimpin langsung oleh Sekda untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan hambatan. Walakin, keterbukaan informasi ini tetap memiliki batasan, terutama pada hal-hal teknis internal antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat diakses sepenuhnya oleh publik.

Mekanisme kerja pelaksanaan program ini dirancang secara bertahap, terstruktur, dan melibatkan koordinasi lintas sektor nonkonvensional. Proses penentuan siswa dilakukan secara sistematis mulai dari basis data desil 1 dan 2, asesmen lapangan oleh pendamping PKH, hingga pemeriksaan kesehatan serentak di 26 puskesmas. Dalam pembagian peran, Dinas Sosial bertindak sebagai leading sector yang memegang peran sentral dalam mengoordinasikan pendataan, seleksi peserta didik, serta menjadi penghubung utama antaraktor. Sebaliknya, Dinas Pendidikan memiliki posisi unik; karena kewenangan utama program ini berada di bawah Kementerian Sosial, peran Dinas Pendidikan bergeser menjadi pendukung administratif (seperti penugasan kepala sekolah), sementara tenaga pengajar disediakan langsung oleh kementerian. Fleksibilitas pembagian peran yang tidak linier dengan kewenangan sektoral biasa ini pada akhirnya menimbulkan dinamika tersendiri, khususnya tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi di lapangan.

3.4. Proses Kolaborasi

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, dimensi proses kolaborasi pada Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang berfokus pada dinamika interaksi berkelanjutan antaraktor melalui empat elemen utama

1. Dialog Tatap Muka

Proses kolaborasi dalam Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang ditandai dengan intensitas komunikasi yang sangat tinggi melalui berbagai forum dialog tatap muka. Dialog ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas birokrasi, melainkan menjadi instrumen utama dalam menyamakan persepsi, melakukan konsolidasi lintas sektor, serta menyelesaikan berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan. Intensitas dialog yang tinggi ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Ibu Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., yang menegaskan bahwa rapat dilakukan secara terus-menerus agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Sebagai leading sector, Dinas Sosial yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Bapak Budi Rahman, S.Sos., M.Si., juga aktif membangun komunikasi yang berkelanjutan dari level pimpinan hingga ke tingkat teknis operasional dengan melibatkan Baperida, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pihak kesehatan.

Forum tatap muka ini menjadi ruang negosiasi yang sangat krusial ketika para aktor dihadapkan pada perbedaan pandangan atau kepentingan strategis, seperti yang terjadi dalam proses penentuan lokasi pembangunan sekolah. Pemerintah daerah sempat mempertimbangkan wilayah Jatigede, namun setelah melalui dialog dan koordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), ditemukan adanya kendala sosial dan kebutuhan relokasi masyarakat, sehingga demi kepentingan bersama lokasi dipindahkan ke Ujung Jaya yang dinilai lebih memungkinkan. Selain di tingkat birokrasi, dialog tatap muka juga diperkuat oleh keterlibatan DPRD Kabupaten Sumedang melalui Bapak Endang Supriatna yang melakukan pengawasan responsif lewat rapat kerja serta pemantauan langsung di lapangan. Pada level akar rumput, dialog ini mewujud dalam bentuk interaksi persuasif langsung antara pendamping PKH dengan masyarakat untuk melakukan asesmen sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai program, sehingga dialog tatap muka di Sumedang berhasil menjadi sarana interaksi yang konstruktif dan adaptif.

2. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi merupakan faktor pendorong paling utama yang menjamin keberlanjutan kerja sama antaraktor dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat. Berdasarkan temuan di lapangan, para aktor menunjukkan komitmen institusional dan kolektif yang sangat tinggi, dimulai dari keberanian pimpinan daerah (Bupati dan Sekda) dalam mengambil keputusan strategis untuk tetap menjalankan program ini demi memutus rantai kemiskinan, meskipun pada tahap awal kondisi daerah belum sepenuhnya siap. Komitmen pimpinan yang kuat tersebut kemudian diinternalisasi oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas sektoralnya masing-masing. Dinas Sosial, misalnya, secara konsisten menunjukkan komitmennya melalui proses seleksi siswa yang ketat serta koordinasi lintas sektor yang tiada henti, di mana kerja sama antar-instansi ini diakui mempermudah segala implementasi di lapangan.

Komitmen yang kuat juga ditunjukkan oleh Baperida dalam mengawal agar program strategis nasional ini tetap berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di tingkat operasional, dedikasi yang tinggi diperlihatkan oleh para pendamping PKH di bawah arahan Ketua Tim Bapak Agus Taufik Habibie; mereka tetap konsisten menjalankan tugas asesmen lapangan secara langsung ke rumah-rumah warga meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan petunjuk teknis pada awal program serta rendahnya pemahaman awal masyarakat. Pendamping PKH secara gigih melakukan pendekatan persuasif demi meyakinkan masyarakat

mengenai besarnya manfaat program ini bagi masa depan anak-anak mereka. Di sisi lain, lembaga legislatif melalui DPRD Kabupaten Sumedang memberikan dukungan penuh terhadap program ini karena kesamaan visi normatif untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan, sehingga komitmen yang kokoh dari level kebijakan hingga level implementasi berhasil menjaga ritme kolaborasi tetap berjalan stabil di tengah dinamika lapangan.

3. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama tidak terbentuk secara instan, melainkan melealui proses komunikasi, sosialisasi, dan interaksi berkelanjutan yang berhasil menyatukan persepsi seluruh aktor mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat Program Sekolah Rakyat. Di tingkat pemerintahan, shared understanding ini sudah terbangun dengan sangat matang, di mana Baperida yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibu Nela Megalita, S.E., menjelaskan bahwa seluruh aktor memahami program ini sebagai upaya strategis untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang. Pemahaman normatif ini diperkuat oleh pandangan holistik Sekretaris Daerah yang menegaskan bahwa program ini menggunakan pendekatan terintegrasi yang menyasar peningkatan kapasitas anak sekaligus pemberdayaan keluarganya, bukan sekadar intervensi pendidikan yang bersifat parsial.

pada tahap awal pelaksanaan sempat terjadi jurang pemahaman (understanding gap) yang cukup signifikan di tingkat masyarakat dan orang tua siswa selaku penerima manfaat langsung. Banyak orang tua, seperti Ibu Enung Nurlaela dan Ibu Nurlia, merasa bingung dan diselimuti kecemasan mendalam karena belum familier dengan konsep sekolah berasrama (boarding school) serta takut anak mereka tidak betah tinggal jauh dari rumah. Ketiadaan pemahaman awal ini juga diakui oleh Kepala Desa Kebon Cau, Bapak Dodo Kuswanda, yang melihat perlunya penjelasan lebih lanjut di tingkat lokal mengenai mekanisme program yang masih baru ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah bersama perangkat desa dan pendamping PKH secara gencar melakukan sosialisasi intensif dan edukasi persuasif langsung ke tengah masyarakat. Setelah diberikan penjelasan bahwa seluruh kebutuhan anak ditanggung penuh oleh pemerintah dan demi masa depan yang lebih baik, kekhawatiran para orang tua berhasil diredam, sehingga tingkat penerimaan masyarakat meningkat drastis seiring dengan terciptanya pemahaman bersama yang solid.

4. Capaian Hasil Sementara

Keberhasilan sementara atau hasil antara yang dicapai dalam proses kolaborasi ini menjadi indikator awal yang sangat positif bahwa kerja sama lintas sektor di Sumedang berjalan ke arah yang benar sebelum mencapai tujuan jangka panjangnya. Hasil sementara ini terwujud dalam bentuk capaian fisik, administratif, maupun penguatan proses kolaboratif itu sendiri. Dari sisi capaian fisik yang paling monumental, Pemerintah Kabupaten Sumedang membuktikan komitmen nyatanya dengan mengalokasikan anggaran daerah yang fantastis, yaitu hampir 9 miliar rupiah, khusus untuk pembebasan lahan yang menjadi prasyarat utama pembangunan gedung sekolah oleh Kementerian Sosial. Dari aspek administratif, kolaborasi ini berhasil merumuskan mekanisme kerja penentuan siswa yang sangat sistematis, akurat, dan akuntabel, dimulai dari pemanfaatan data kemiskinan desil 1 dan desil 2, pelaksanaan asesmen

lapangan yang detail oleh pendamping PKH, hingga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon siswa yang dilakukan secara serentak di 26 puskesmas se-Kabupaten Sumedang.

hasil antara yang tidak kalah penting adalah terjadinya peningkatan kualitas hubungan dan koordinasi kerja antar-OPD di daerah, serta antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Pusat. Pembagian peran yang jelas—di mana kementerian pusat bertanggung jawab penuh pada pembiayaan dan pembangunan fisik sedangkan pemda bertanggung jawab menyiapkan lahan serta mengoordinasikan operasional—terbukti mampu menciptakan sinergi yang harmonis di lapangan, yang bahkan diakui langsung oleh pihak pelaksana pembangunan fisik program tersebut. Segala pencapaian awal yang terstruktur dan masif ini membuat Kabupaten Sumedang mendapatkan penilaian dan apresiasi yang sangat baik dari pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan awal program. Walaupun pada masa-masa awal kolaborasi sempat diwarnai oleh kendala teknis berupa minimnya petunjuk teknis yang jelas serta dinamika kekhawatiran orang tua, keberhasilan sementara yang telah diraih ini menjadi modal sosial dan struktural yang kuat untuk mengoptimalkan kolaborasi secara berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat miskin dalam rangka memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan inklusif. Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumedang juga merupakan sarana pemberdayaan sosial yang krusial bagi peningkatan kualitas hidup keluarga rentan. Penulis menemukan temuan penting yakni proses kolaborasi berjalan dengan cukup baik dikarenakan adanya sinergi yang kuat dan kepemimpinan fasilitatif dari Bupati serta Sekretaris Daerah yang mampu menggerakkan aktor lintas sektor (OPD, pemerintah desa, dan masyarakat). Sama halnya dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang mengandalkan dialog tatap muka intensif untuk membangun kepercayaan, komitmen yang dibangun oleh para pemangku kepentingan lintas instansi di Kabupaten Sumedang merupakan kunci berjalannya Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi ini.

Layaknya program lainnya, Program Sekolah Rakyat Terintegrasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan pada desain institusionalnya, di mana Dinas Sosial mengambil alih fungsi teknis urusan pendidikan yang secara struktural berseberangan. Selain itu, pemahaman awal masyarakat dan regulasi diakui belum maksimal, salah satunya dikarenakan oleh belum optimalnya petunjuk teknis operasional dan kekhawatiran masyarakat terhadap sistem sekolah berasrama. Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diinisiasi sebagai bentuk intervensi kemiskinan, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah adanya urgensi penanganan masalah sosial yang diiringi oleh ketimpangan sumber daya dari pusat dan daerah. Hal ini yang membuat berbagai pihak berkomitmen untuk berpartisipasi menyukseskan Program Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan sumber daya, modal sosial, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi untuk saling melengkapi. Artinya pemerintah setempat berhasil mengubah ketimpangan sumber daya menjadi hubungan saling ketergantungan yang fungsional sebagai salah satu pendorong kolaborasi.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat rentan, meningkatkan kualitas SDM secara masif, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi secara berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menyasar anak didik melainkan juga keluarga membuat program ini mampu memberikan intervensi sosial yang lebih luas, memberikan akses bantuan dan pelatihan, serta pada

akhirnya membantu masyarakat memperbaiki ekonomi keluarga mereka di masa depan.

Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi secara umum telah berjalan dan memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan. Program ini, yang mengusung sistem pendidikan berasrama (boarding school), tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup peserta didik. Selain itu, program ini juga menjadi sarana yang efektif untuk menyatukan komitmen lintas instansi dari tingkat kementerian hingga aparatur desa.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang antara lain:

a. Peran Kepemimpinan Fasilitatif: Bupati dan Sekretaris Daerah berperan sentral dalam memfasilitasi dan menggerakkan aktor lintas sektor untuk berkolaborasi meskipun terdapat keterbatasan pada tahap awal;
b. Sinergi dan Modal Sosial: Program ini ditopang oleh modal sosial yang tinggi serta komitmen antar instansi yang terbangun melalui koordinasi dan dialog tatap muka yang intensif;
c. Tumpang Tindih Kewenangan: Terdapat kelemahan struktural pada desain institusional berupa tumpang tindih kewenangan, di mana Dinas Sosial memegang tanggung jawab yang bersinggungan dengan ranah pendidikan;
d. Keterbatasan Regulasi Operasional: Pelaksanaan program masih rentan dan dihadapkan pada hambatan berupa belum sinkron atau belum optimalnya petunjuk teknis operasional antara pusat dan daerah;
e. Dinamika Persepsi Masyarakat: Terdapat tantangan berupa kekhawatiran atau resistensi awal dari orang tua siswa terhadap konsep sekolah berasrama, yang berhasil ditekan melalui pendekatan persuasif;
f. Pemanfaatan Ketergantungan Sumber Daya: Kondisi perbedaan kapasitas sumber daya dan tingginya urgensi penanganan kemiskinan justru berhasil dimanfaatkan sebagai pendorong utama kolaborasi yang saling melengkapi.

Secara keseluruhan, proses *Collaborative Governance* dalam Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun fondasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, meskipun secara struktural masih membutuhkan sinkronisasi kebijakan demi keberlanjutan program.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan dan berhasil membangun sinergi antar aktor untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Proses kolaborasi ini didorong oleh kuatnya kepemimpinan fasilitatif dari Bupati dan Sekretaris Daerah, urgensi penanganan kemiskinan, serta ketergantungan sumber daya lintas sektor. Namun demikian, secara struktural kolaborasi ini masih rentan pada desain institusionalnya akibat adanya tumpang tindih kewenangan di mana Dinas Sosial mengambil alih fungsi teknis urusan pendidikan.

Terdapat beberapa faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi ini, yaitu kuatnya komitmen pimpinan daerah, tingginya modal sosial dari riwayat kerja sama sebelumnya (seperti pada program PKH), serta adanya insentif multidimensional (sosial, ekonomi, dan politik) bagi para aktor. Sementara itu, faktor yang menghambat jalannya kolaborasi meliputi adanya tumpang tindih kewenangan (potensi ego sektoral), regulasi atau petunjuk teknis operasional yang belum optimal, serta resistensi psikologis/persepsi awal masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem sekolah berasrama (boarding school).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang terbatas pada fase awal pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten Sumedang sebagai model studi kasus tunggal, sehingga dinamika struktural dan temuan yang dihasilkan mungkin bersifat kasuistik dan tidak dapat sepenuhnya digeneralisasikan pada kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik birokrasi dan sosial-budaya yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini memotret kondisi kolaborasi di tahap awal perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi dampak jangka panjang (impact evaluation) dari program ini terhadap penurunan riil angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas lokus studi ke daerah lain yang mengimplementasikan program serupa guna menemukan model sinkronisasi kebijakan lintas sektoral yang lebih ideal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Sumedang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang yang telah memberikan izin serta dukungan penuh, sehingga penelitian mengenai *Collaborative Governance* ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang beserta jajarannya, serta para pengelola teknis Program Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi, yang telah memberikan kesempatan emas bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Keterbukaan dalam memberikan ruang diskusi, berbagi informasi, serta penyediaan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini sungguh menjadi kontribusi yang luar biasa bagi penulis.

Rasa hormat dan apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada seluruh informan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangsih pemikiran, serta membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir. Semoga segala bantuan, kebaikan, dan ketulusan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta perbaikan kebijakan publik di masa depan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afrisal, A. F., Haning, M. T., Ibrahim, M. A., & Yunus, M. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *11*(5), 497–509. https://doi.org/10.55129/.v11i5.2429 https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2429

Alfan, M., Ramadhan, M. R., Hasanah, S. M., Khoirunnisa, T., Faisal, R., Yuniawatika, Y., Herwanto, H. W., Prestiadi, D., Nurfirmansyah, I. S., & Alif, M. R. N. (2026). Creativity-embedded pedagogical learning model for preservice teacher education program in Indonesia: a case study. *Discover Education*, *5*(1). https://doi.org/10.1007/s44217-026-01430-z

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Asriani, A., Zainal, N. H., & Suaib, M. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion*, *3*(2), 86–99. https://doi.org/10.56326/jp.v3i2.3179

Badan Pusan Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang (2024). Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Sumedang https://sumedangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYjMg==/karakteristik-kemiskinan-kabupaten-sumedang.html

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-miskin-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat

Dinas Pendidikan Jabar. (2024). Jumlah Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Kabupaten/Kota. https://sync-disdik.jabarprov.go.id/statistik_20242025/index.php?pages=Putus_Sekolah

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press. https://books.google.co.id/books?id=3E1gCwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id&source=gbs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false

Fadillah, A. (2021). Marko Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makroekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia) Macro Economy And Poverty Reduction In Indonesia (Analysis of Economic Growth Capability. *Islamic Science, Culture, and Social Studies*, *1*(2). https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.84

Handayani, N., & Tumija, T. (2016). Strategi Pengendalian Kemiskinan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *42*(2), 37. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.149

Herawan, N. S., Putri, S. D., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *7*(9), 324–333. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7816433 https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/149

Jaya, A., Murahman, M., & Muslimin, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas. *Masda*, *2*(2), 114–121. https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/masda/article/view/202

Kumbara, A. A. N. A., Rinni Liando, M., & Sutrisno, N. (2023). Empowerment of Structures and Agents in Cultural Poverty Alleviation in West Tianyar Village Karangasem Regency Bali. *Jurnal Kajian Bali*, *13*(2), 598–622. https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p11

Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How Is Political Behavior in Decision-Making? Organizational Culture Perspective in Governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *17*(1), 13–31. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4335

Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *10*(1), 73–96. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384

Nasution, D. A., & Mulyana. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, *2*(2), 106–125. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5204

Rahardjanto, T. (2018). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Jambi. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *11*, 41–50. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/966

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.*

Theresa, N. G. (2024). Upaya dan Komitmen Pemerintah dalam Program Percepatan Penurunan Kasus Stunting di Kelurahan Pejagan, Bangkalan. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*

(MPPKI), *7*(6), 1467–1473. https://doi.org/10.56338/mppki.v7i6.5171

UNESCO. (2023). *Transforming knowledge for just and sustainable futures International Conference to mark the 30 th anniversary of the*. (November 2022), 83. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387435_fre

Vebrianto, R., Budiawan, A., Thahir, M., & Hamzah, M. L. (2025). Governance and Development of Child Friendly Educational Unit (CEA) Models in Indonesia. *Munaddhomah*, *6*(2), 310–328. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i2.1703

Weber, E. P., Lovrich, N., & Gaffney, M. J. (2005). Collaboration, Enforcement, and Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity. Society & Natural Resources. https://doi.org/10.1080/08941920591005034

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 291–310. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858